



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 1246 / 2013

TENTANG

**PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

- Membaca** : a. Surat perusahaan PT. Molax International
Nomor : 109/Dir.MI/XII/2012
Tanggal : 10 Desember 2012
Hal : Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UMP 2013
b. Surat Serikat Pekerja PT. Molax International
Nomor : -
Tanggal : 30 Januari 2013
Hal : Penolakan Penangguhan UMP 2013
- Menimbang** : a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) ;

- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang menyepakati ;
1. Apabila pengusaha dan serikat pekerja/buruh sepakat, maka permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.
 2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerja/buruh tidak sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp 1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)
 3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerja/buruh.
- c. bahwa telah dilakukan kunjungan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit tanggal 8 Pebruari 2012 dimana jumlah pekerja pada tanggal 18 Desember 2012 sejumlah 998 orang pekerja serta penelitian atas kelengkapan administrasi dan dinyatakan ;

Kesepakatan Bersama antara pengusaha dengan pekerja PT. Molax International dibuat di Jakarta tanggal 12 Desember 2012, namun lampiran tanda tangan kesepakatan pekerja tercantum tanggal 18 Desember 2012.

- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
15. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :

Nama Perusahaan : PT. Molax International

Alamat Perusahaan : Jl. Jawa IX Blok C No. 13, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara 14140

Kedua : Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah minimum Tahun 2013 untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Keempat : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 545/2013 Tanggal 28 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 21-2-2013

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
DKI JAKARTA,**



Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.